

Peran Uni Eropa Dalam Kampanye Lingkungan Melalui Film “SAVE KALIMANTAN”

Muhammad Feri Teguh Santoso; Ali Martin

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim

Email: alimartin@unwahas.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to describe the role of the European Union in environmental campaigns through the film “Save Kalimantan”, International Organization theory is the material used in this research study. This research method uses a qualitative descriptive method which includes research and collection of various empirical materials. The conclusion shows that the role of the European Union in the environmental campaign through the film “Save Kalimantan” is the role of advocacy, the role of communicator, the role of motivator. The environmental campaign program carried out by the European Union through the film “Save Kalimantan” is a change in knowledge, attitudes and behavior of people who are motivated to build a community mentality that is committed to supporting environmental sustainability, especially in protecting forests and the flora and fauna in them.

Keywords: *European Union, environment, film, campaign*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan peran Uni Eropa dalam kampanye lingkungan melalui film “Save kalimantan”, teori Organisasi Internasional adalah bahan yang digunakan dalam kajian penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai material empiris. Kesimpulan menunjukkan bahwa peran Uni Eropa dalam kampanye lingkungan melalui film “Save kalimantan” adalah peran sebagai advokasi, peran sebagai komunikator, peran sebagai motivator. Program kampanye lingkungan yang dilakukan Uni Eropa melalui film “Save kalimantan” yaitu terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang termotivasi membangun mental masyarakat yang berkomitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan terutama dalam menjaga hutan dan flora fauna yang ada di dalamnya.

Kata kunci: *Uni Eropa, lingkungan, film, kampanye.*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan perubahan iklim ini menjadi penting dan menjadi isu global karena dampak perubahan iklim itu sendiri bisa langsung berdampak pada kualitas manusia di bumi ini, sama seperti pengaruh isu politik dan isu ekonomi. Isu lingkungan ini juga merupakan sebuah ancaman yang tidak hanya mengancam Negara tetapi mengancam seluruh umat manusia di bumi, karena permasalahan lingkungan ini adalah berkaitan dengan samudra laut, sistem iklim, ozon dan lain-lain yang merupakan sistem pendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Isu lingkungan hidup menjadi

salah satu agenda global pada abad ke – 21 yang melibatkan banyak pihak seperti pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industrial, LSM, dan warga negara. Ada pergeseran tingkatan pada isu lingkungan yang pada awalnya hanya berada di level *low politics* menjadi salah satu isu sentral pada perpolitikan dunia (*world politics*). Pembahasan lingkungan menjadi salah satu hal yang dirundingkan secara global karena sangat penting setelah agenda klasik dalam politik internasional, yaitu isu keamanan dan isu ekonomi.

Kemunculan dari isu lingkungan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti berakhirnya rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang ideologi dan militer yang menjadi peluang munculnya masalah lingkungan yang diperbincangkan Negara-Negara Barat, munculnya kesadaran publik dan media terhadap lingkungan global yang mulai tersingkirkan dan kaum intelektual yang mempublikasi hasil penelitian mereka tentang kondisi lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Perkembangan isu lingkungan hidup secara bersatu bersifat global seperti emisi karbondioksida yang menjadi kontributor dalam perubahan iklim, beberapa masalah dikaitkan dengan eksploitasi *the global commons*, yaitu : sumber-sumber yang menjadi milik bersama dari seluruh anggota masyarakat internasional seperti samudra, atmosfer, dasar laut, dan ruang angkasa yang harus dipelihara dan dijaga untuk kepentingan bersama, banyak masalah lingkungan hidup yang secara intrinsik transnasional dimana telah melewati batasbatas negara bahkan sekalipun masalah-masalah itu tidak seluruhnya bersifat global seperti masalah emisi sulfur dioksida yang mengandung hujan asam yang berasal dari satu negara akan terbawa angin dan memasuki wilayah negara lainya yang melibatkan aktor negara dan non-negara untuk bisa menyumbang terhadap berbagai masalah atau berbagai upaya untuk menanggulangnya dan banyak proses.

Eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan secara relatif dalam skala lokal atau nasional yang terjadi di sejumlah tempat di seluruh dunia kemudian dipandang sebagai masalah-masalah global seperti masalah polusi udara, pencemaran air sungai dan defrontasi karena adanya pengaruh politik dan ekonomi.¹ Sebuah studi dari *European Space Agency* mengemukakan bahwa hutan gambut memiliki potensi sebagai penyerap karbon planet. Kebakaran pada tahun 1997-1998 telah melepaskan hingga 2.5 miliar ton karbon, dan kebakaran tahun 2002-2003 telah melepaskan antara 200 juta hingga 1 miliar ton karbon ke atmosfer. Para penulis laporan menemukan bahwa emisi karbon yang terlepas akibat kebakaran hutan pada bulan September dan Oktober 2015 sebesar 11,3 juta ton karbon per hari, lebih tinggi daripada emisi seluruh Uni Eropa, yang tiap harinya melepaskan 8,9 juta ton pada periode yang sama.

Kebakaran lahan gambut menjadi salah satu berita tanpa henti dan menjadi bencana besar dalam skala regional Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan pada tahun 2015 sangat luas dan menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp 200 trilyun lebih. Kebakaran ini disebabkan terjadinya fenomena El Nino yang ditandai dengan musim kemarau yang tidak normal yang terjadi secara periodik antara 4-5 tahun. El Nino terparah sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1997-1997 yang

¹ Rahmansyah, Abdul Rauf, "TRANSFORMASI AKTOR POLITIK INTERNASIONAL: Studi Kasus Peranan Greenpeace Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia," *HIMAHI FISIP UNHAS*, December 20, 2015, <https://himahiunhas.id/index.php/2015/12/20/transformasi-aktor-politik-internasional-studi-kasus-peranan-greenpeace-terhadap-kerusakan-lingkungan-di-indonesia/>.

mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan hutan. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan berperan besar dalam proses pengeringan hutan gambut yang menyebabkan karbon terlepas dari lahan gambut. Penyelamatan hutan gambut diketahui dapat mencegah terlepasnya karbon lebih banyak di dibandingkan dengan usaha pencegahan deforestasi dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, Indonesia memiliki 50% hutan gambut di wilayah tropis dan 10% hutan gambut di dunia.

Sebagai bagian dari rangkaian *Climate Diplomacy Week 2018*, delegasi dari Uni Eropa bekerjasama dengan Kedutaan Besar Polandia, Kedutaan Besar Italia, Pusat Kebudayaan Italia dan platform sosial *Livelif* Indonesia. Menyelenggarakan nonton bareng dan diskusi film "Save Kalimantan", pemutaran film tersebut diikuti dengan diskusi publik yang bertema "memahami kebakaran hutan dan dampaknya". Selama sepekan mulai tanggal 23 hingga 30 September 2018, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mensosialisasikan sejumlah aspek pelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta.² Sesuai latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan sebagai berikut Bagaimana peran Uni Eropa dalam kampanye lingkungan melalui film "Save Kalimantan"? Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Uni Eropa dalam kampanye lingkungan melalui film "Save Kalimantan".

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah Teori Organisasi Internasional dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang didunia, mualai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi samapi kelingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berbeda dalam satu kawasan.

Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia sejak lama telah menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata antar negara. Organisasi yang dilengkapi dengan seksi-seksi yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana prasaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.

Akhirnya upaya pembentukan organisasi-organisasi internasional yang sebenarnya baru mulai pada abad ke-17 dan 18 mulai berbagai proyek. Pada abad ke-17 misalnya

² "Uni Eropa Tingkatkan Kesadaran Publik Akan Kompleksitas Dan Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia," *European Union External Action: The Diplomatic Service of the European Union*, September 23, 2018, <https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/51226/uni-eropa-tingkatkankesadaran-publik-akan-kompleksitas-dandampak-kebakaran-hutan-di-id>.

muncul gagasan *emeric de cruce* pada tahun 1623. Kemudian pada abad ke-18 muncul proyek-proyek *William penn, bentham, jean jaques rousseau, abbe de saint-pierre* dalam plan for perpetual peace mengusulkan pembentukan suatu majelis umum untuk menyelesaikan semua sengketa dengan mayoritas $\frac{3}{4}$ suara beserta sanksi kolektif termasuk penggunaan senjata. *Abbe de saint-pierre* juga berpendapat bahwa majelis umum bukan saja berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, tapi juga untuk membuka kerjasama antar negara di berbagai bidang dengan mendirikan perwakilan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut.

Dengan kemajuan teknik dan saling ketergantungan ekonomi yang mulai dirasakan di abad ke-19 dianggap perlu untuk mengembangkan kerjasama internasional. Mulai bagian kedua abad ke-19 sampai tahun 1914, Eropa mengalami periode cukup panjang yang disertai kemajuan teknik sarana komunikasi, dan keadaan ini telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi kerjasama internasional.³ Disamping itu pada waktu yang sama juga berkembang organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs). Menurut Union of International Associations, di samping perkembangan yang begitu cepat organisasi internasional yang berjumlah 7 pada tahun 1870-an dan menjadi 37 pada tahun 1909, perkembangan NGOs lebih cepat lagi yaitu mencapai jumlah 167 pada waktu yang sama. Pada awal munculnya organisasi-organisasi internasional pada abad ke-19 yang pertama adalah komite internasional untuk Sungai Elbe tahun 1821, untuk Sungai Rhine pada tahun 1831 dan pembentukan European Danube Commission pada tahun 1856 untuk mengawasi pelayaran bebas di atas sungai tersebut yang lepas dari pengawasan nasional masing-masing negara.

Selanjutnya gagasan untuk menghimpun sejumlah ahli dan administrator yang melaksanakan tugas-tugas khusus atas nama negara-negara telah dapat diwujudkan dalam pendirian Internasional Bureau pada tahun 1868 yang kemudian bernama Internasional Telecommunication Union (ITU) dan pembentukan General Postal Union pada tahun 1874 yang kemudian menjadi Universal Postal Union (UPU). Tidak lama kemudian didirikan pula Internasional Bureau of Weights and Measures pada tahun 1875 dan Inter-Union for the Publication of Customs Tariff pada tahun 1890. Organisasi non-pemerintah yang sangat terkenal pada permulaan abad ke-20 dan yang mengembangkan konvensi-konvensi Jenewa pada tahun 1869, 1906, 1929 adalah International Committee of the Red Cross (ICRC).⁴

Pada perang dunia pertama telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk suatu organisasi internasional dengan harapan kekuasaan lebih tinggi dari yang memiliki negaranegara yaitu Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Dengan lahirnya LBB ini dimulailah yaitu generasi kedua organisasi-organisasi internasional. Pada periode menjelang perang dunia kedua, selain LBB antara lain juga lahir Organisasi Buruh Sedunia pada tahun 1919, Organisasi Penerbangan Internasional pada tahun 1919 dan juga Makamah Tetap Internasional pada tahun 1920. Berakhirnya perang dunia kedua di tahun 1945 juga mengakhiri kehidupan LBB yang telah gagal mencegah perang. Di samping itu juga perang dunia kedua telah membangkitkan lagi kesadaran atas keharusan mutlak kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya perang dunia dengan cara menciptakan

³ Dormoy, Daniel, *Droit Des Organisations Internationales* (Paris: Dalloz, 1995).

⁴ "Yearbook of the International Organization Vol. 15" (Brill, 1974).

kondisi yang baik bagi kerjasama antar negara. Dengan berakhirnya perang dunia pada tahun 1945 maka mulai pula generasi ke-3 organisasi internasional yaitu dengan lahirnya PBB.⁵

1. Tinjauan Umum Mengenai Organisasi Internasional

Kehadiran organisasi internasional memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu dalam proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat dikatakan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa dirinya terkait untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain.⁶

Ada beberapa syarat sebuah organisasi dapat disebut sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut:⁷

1. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional.
2. Harus mempunyai anggota dimana setiap anggota mempunyai hak suara.
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar headquarters demi kelangsungan organisasi.
4. Pejabat atau pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara.
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara atau bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri atau independent dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak di akui lagi.

2. Klasifikasi Organisasi Internasional

Persoalan klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan aktifitasnya, dapat kita lihat dalam beberapa hubungan sebagai berikut:⁸

1. Organisasi yang bertujuan mendorong hubungan kooperatif diantara anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara.
2. Organisasi yang bertujuan untuk meniadakan tingkat konflik diantara negara anggota dengan jalan manajemen konflik atau *conflict prevention*.
3. Organisasi dengan tujuan menciptakan atau memproduksi konfrontasi diantara anggota yang berbeda pendapat

Klasifikasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki beberapa macam. Metode yang paling mudah untuk melakukan klasifikasi terhadap organisasi internasional antara pemerintah adalah klasifikasi organisasi internasional berdasarkan tujuan dan keanggotaan

⁵ Mauna, Boer, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2nd ed., 6 (Bandung: Alumni, 2015).

⁶ Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁷ Archer, Clive, *International Organizations: Fourth Edition* (New York: Routledge, 2015).

⁸ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, n.d.).

organisasi tersebut. Secara keanggotaan, terdapat pada organisasi internasional universal. Tujuan organisasi general salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi dengan tujuan spesifik adalah organisasi-organisasi seperti IAEA dan WHO.

PEMBAHASAN

Analisa Peran Uni Eropa dalam Kampanye Lingkungan melalui Film "SAVE KALIMANTAN"

A. Peran Uni Eropa Sebagai Advokasi

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2015 yang menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Indonesia menjadi keprihatinan kita bersama. Kabut asap ini diakibatkan dari aktivitas ilegal perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan dan pengeringan lahan gambut guna kepentingan mereka yaitu membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Kabut asap ini menyerang ke beberapa daerah di Indonesia seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan dan juga Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam.

Dari kabut asap tersebut membuat beberapa sekolah ditutup yang mengakibatkan anak-anak tidak dapat bersekolah, aktivitas terhambat, dan muncul beberapa penyakit pernafasan, seperti ispa dan juga penyakit kulit. Menurut data dari laman milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatatkan luas kebakaran di Kalimantan pada tahun 2015 mencapai 957.725,17 Ha.⁹ Kampanye komunikasi secara teoritis ialah untuk memberi informasi dan mempengaruhi masyarakat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program pelayanan masyarakat, melalui berbagai poster, pemberitaan koran, pemberitaan majalah, iklan di televisi, radio, berbicara dengan pemuka masyarakat, dan selebaran-selebaran mengenai kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan gambut. Kampanye komunikasi mempunyai tujuan untuk memberitahu, membujuk dan memotivasi perubahan perilaku kepada khalayak umum, dalam arti sempit maupun luas.

Hovland dan Weis berpendapat, bahwa perubahan sikap seseorang lebih besar pengaruhnya jika disebabkan oleh komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu komunikator memegang kendali peranan sangat penting dalam kampanye. Sikap memerlukan objek, baik berupa benda, kehidupan, situasi, kondisi atau lingkungannya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kampanye salah satunya melalui media film.¹⁰ Advokasi lingkungan muncul berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia serta kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap sumberdaya alam. Advokasi lingkungan adalah upaya-upaya pembelaan dan

⁹ "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020," *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI*, accessed July 20, 2020, <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/lu>.

¹⁰ Suryani, Ita, "PERAN MEDIA FILM SEBAGAI MEDIA KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP Studi Kasus Pada Film Animasi 3D India 'Delhi Safari,'" *Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde* 2, no. 2 (2014): 79-90.

pemberdayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 2020 orang untuk melakukan perubahan kearah lingkungan hidup yang lebih baik.¹¹

Menurut Mansour Faqih advokasi itu dianggap salah satu media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Advokasi merupakan suatu usaha secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan. Itu berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh berbagai organisasi, masyarakat sipil dan pihak strategis lainnya masuk dalam kategori advokasi yang dimaksud. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dilakukan akibat dari eksportir kelapa sawit terbesar dunia sehingga memicu praktik deforestasi yaitu penggundulan hutan yang dialihkan ke perkebunan, perternakan atau perkampungan yang kini semakin berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan.

Kenaikan tersebut berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan Pada tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar. Selanjutnya, pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta hektar.¹² Menurut data World Resources Institute (WRI) Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada 2018. Pada tahun tersebut Indonesia kehilangan lahan hutan hujan primer tropis seluas 339.888 hektare (ha). Angka tersebut berada di urutan ketiga setelah Brasil (1,35 juta ha) dan Kongo (481.248 ha). perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, terjadinya kebakaran hutan, dan pengalihan lahan hutan untuk permukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi.

Untuk mengukur angka deforestasi, Indonesia telah melakukan penghitungan sejak 1990. Indonesia mencatat angka deforestasi tertinggi yakni mencapai 3,51 juta ha/tahun pada 1996-2000. Luas tersebut terdiri atas 2,83 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,68 ha non-kawasan hutan. Terjadi kebakaran hutan yang hebat menjadi pemicu tingginya deforestasi. Deforestasi tertinggi kedua di Indonesia terjadi pada periode 2014-2015 dengan luas 1,09 juta ha yang terdiri atas 0,82 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,28 ha lahan non-kawasan. Masih terjadinya tumpang tindih perizinan pengelolaan kawasan hutan, ancaman kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan menjadi permukiman masyarakat akan menjadi pendorong terjadinya deforestasi. Isu ini tak pelak menjadi perhatian NGO (Non-Governmental Organization) yang berfokus pada isu lingkungan, termasuk isu Deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa yaitu Greenpeace Unit Eropa bekerjasama

¹¹ Stephanus, Daniels, "Sekelumit Cerita Tentang Advokasi Lingkungan Hidup," *Kompasiana*, December 11, 2015, https://www.kompasiana.com/denielsephanus/566a36da7097732a06d644dd/sekelumit-cerita-tentang-advokasi-lingkungan-hidup?page=all&page_images=1.

¹² "Statistical Yearbook of Indonesia 2018" (Badan Pusat Statistik, 2018), <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/0%203/5a963c1ea9bofed6497do845/statistikindonesia-2018.html>.

melakukan aksi kreatif di negara-negara Uni Eropa.¹³ NGO menggunakan jejaring advokasi transnasionalnya untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran akan isu yang diadvokasikan oleh NGO tersebut dalam kampanyenya. Kampanye lingkungan di daerah setempat mungkin gencar, inventif, dan terkadang berlarut-larut, tetapi NGO biasanya tidak dapat mewujudkan tujuan mereka karena pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi daerah setempat bukanlah NGO itu sendiri.

Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa melakukan aksi di daerah yang pemerintahannya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Alasan aksi dilakukan di daerah Uni Eropa didasarkan pada dua hal, pertama kawasan Uni Eropa saat ini merupakan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, kedua sejak 4 April 2017, kedua Uni Eropa menerapkan peraturan non-tarif barang-barang impor, yakni resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan), dimana Parlemen Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi.¹⁴ Peraturan ini dimaksudkan untuk menyortir dan mengawasi minyak kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa.

Sebelum menerima minyak kelapa sawit, Uni Eropa akan terlebih dahulu memeriksa bagaimana produksi kelapa sawit ditanam dan diproses. Ketika ada ketidaksesuaian, maka pembelian akan dihentikan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk memicu perluasan isu deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit kepada publik, terutama Uni Eropa dimana sejak 4 April 2017 mereka telah menerapkan kebijakan impor kelapa sawit yang harus diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan, terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan.

Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa melalui jaringannya di Uni Eropa. Greenpeace Uni Eropa sebagai jejaring dari Greenpeace Indonesia meminta Uni Eropa sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit untuk memperhatikan produsen minyak kelapa sawit mana, yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan sehingga Uni Eropa mengonsumsi minyak kelapa sawit yang diproduksi hanya dari negara yang menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlihatkan dari pernyataan Sebastien Risso, Direktur Kebijakan Hutan Greenpeace di Uni Eropa yang pada tahun 2017 (Greenpeace European Unit, 2017). Dari pernyataan Risso terlihat bahwa tindakan nyata yang diinginkan oleh Greenpeace terhadap Uni Eropa adalah adanya regulasi yang bisa menjamin tidak adanya penggunaan minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan prinsip perkebunan berkelanjutan.

Greenpeace Uni Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan nyata guna menanggulangi praktik deforestasi global. Desakan ini mendapatkan respon dari

¹³ Kusnandar, Viva Budy, "Inilah Deforestasi Di Indonesia Periode 1990-2017," *Databoks KataData*, August 20, 2019.

¹⁴ Riset Kelapa Sawit, "Resolusi Minyak Sawit Uni Eropa & Isu Deforestasi," *GAPKI*, April 26, 2017, <https://gapki.id/news/2017/04/26/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi/>.

Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ RED II) yang dituangkan dalam regulasi turunan (Delegated Act). Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep Indirect Land Use Change (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Pelarangannya sendiri dimulai sejak tahun 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030. Regulasi ini sebenarnya buah dari tidak transparannya data konsesi kelapa sawit di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia untuk membuka data konsesi ini hampir selalu menolak.¹⁵

Kebijakan RED II mengundang perhatian dari para pelaku industri sawit Indonesia. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, jika tidak ada kebijakan yang sifatnya luar biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka industri sawit nasional dalam bahaya. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam.¹⁶ Bersama dengan Malaysia, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat keberatan terhadap kebijakan tersebut.¹⁷ Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia keberatan atas kebijakan tersebut dikarenakan dalam kebijakan RED II, kelapa sawit ditetapkan sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Hal ini ditambah dengan upaya Uni Eropa mencoba untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit pada biofuel. Oleh karena sikap diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, harga komoditas minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global pun mengalami penurunan,¹⁸ yang berimbas pada pedagang-pedagang kelapa sawit Indonesia, termasuk Wilmar International. Tidak hanya harga komoditas sawit yang turun, tetapi stakeholders sawit juga mengeluhkan adanya gejolak sosial dan ekonomi akibat sikap diskriminatif Uni Eropa. Menurut Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung, Uni Eropa juga harus memperhatikan pekerja yang berada dalam sektor industri sawit.¹⁹ Menurutnya, pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit di Indonesia menyerap pekerja sebanyak 16,2 juta jiwa.

Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mengamplifikasi jaringan dengan Greenpeace lainnya, terutama Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa. Greenpeace Indonesia membangun koalisi dengan jaringannya di Eropa dan US tersebut agar terbentuk adanya kesepahaman dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. Greenpeace Indonesia menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu

¹⁵ BBC News Indonesia, "Indonesia Gugat Uni Eropa Ke WTO Atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit,'" *BBC News Indonesia*, December 16, 2019, Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan 'diskriminasi sawit'.

¹⁶ Warta Ekonomi, "Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit," *Warta Ekonomi*, August 4, 2019, <https://wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi-perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit>.

¹⁷ Friana, Hendra, "Jokowi Diminta Tegur Luhut Soal Ancaman Keluar Paris Agreement," *Tirto.ID*, March 29, 2019, <https://tirto.id/jokowi-diminta-tegur-luhut-soal-ancaman-keluar-paris-agreement-dku9>.

¹⁸ Danar Agus Susanto, "DAYA SAING EKSPOR PRODUK CPO INDONESIA DAN POTENSI HILIRISASI DIOLAH MENJADI BIODIESEL," *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 4, no. 2 (December 7, 2020), <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.952>; Gumilar, Pandu, "Petani Kelapa Sawit: ISPO Perlu Setara Dengan RSPO," *Bisnis*, March 28, 2018,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180328/99/755287/petani-kelapa-sawit-ispo-perlu-setara-dengan-rspo>; BBC News Indonesia, "Indonesia Gugat Uni Eropa Ke WTO Atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit.'"

¹⁹ Suhendra, Zulfi, "Jutaan Pekerja Industri Sawit Terancam Kebijakan Uni Eropa," *DetikFinance*, April 24, 2019.

transnasional, maka hal yang perlu dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu menjalin hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun di daerah lain. Aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dianggap memiliki kreatifitas oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu Kreatif dan Konfrontatif.²⁰

B. Peran Uni Eropa Sebagai Komunikator

Menjaga keutuhan lingkungan bukanlah hal yang mudah, kualitas hidup manusia yang semakin tinggi, konsumsi terhadap sumber daya alam dan kebiasaan manusia yang sering mencemari lingkungan yang menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak besar dan menjadi sulit untuk diatasi, melihat kerusakan lingkungan di Indonesia sedemikian parah kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi, perubahan iklim dan desforestasi adalah bagian yang mengancam kelestarian lingkungan. Melihat hal ini sangat penting untuk melakukan komunikasi lingkungan.

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk memberitahu, mengubah sikap, mengubah pendapat atau untuk mengubah perilaku baik secara lisan maupun melalui media yang ada. Herlina berpendapat komunikasi lingkungan adalah upaya meningkatkan peran ilmu komunikasi dalam melestarikan lingkungan, intinya adalah menyadarkan khalayak untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi.²¹

Komunikasi lingkungan menurut Robert merupakan media pragmatis dan konstruktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan. Menyangkut strategi pengemasan pesan dalam media untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan adalah pemerintah dan organisasi non pemerintah yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.²²

Sementara menurut Cox mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah studi tentang cara kita berkomunikasi tentang lingkungan, pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap persepsi kita terhadap lingkungan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan wahana atau alat pragmatis dan konstitusif untuk mempelajari dan mengerti tentang lingkungan termasuk hubungan kita terhadap lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan media simbolik yang digunakan untuk mengkonstruksi masalah lingkungan dan untuk menegosiasikan respon masyarakat yang berbeda. Komunikasi lingkungan tidak hanya melibatkan tata kelola lingkungan, namun lebih dari itu, komunikasi lingkungan juga mencakup studi mengenai opini publik dan persepsi.²³

²⁰ Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, and Wawan Budi Darmawan, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International," *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (January 24, 2020): 74–91, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.

²¹ Virgy, Djuyandi, and Darmawan.

²² Yuliawati, Yuliawati, "IDENTIFIKASI KAMPANYE GERAKAN LINGKUNGAN HIJAU DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL (Studi Kasus Tentang Identifikasi Kampanye Progam Lingkungan Hijau Melalui Tanaman Hidroponik Oleh Kodim 0503 Jakarta Barat)," *JPI: Jurnal Politikom Indonesia* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1423>.

²³ Ardian, Haldi Yunan, "KAJIAN TEORI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENELITIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM," *Perspektif Komunikasi* 1, no. 1 (2017).

Cox menyimpulkan bahwa komunikasi lingkungan merupakan suatu sub bidang ilmu komunikasi yang didalamnya terdapat beberapa area studi yang berbeda atau interdisipliner. Namun demikian komunikasi lingkungan pada prinsipnya memiliki dua fungsi utama yaitu:²⁴

1. Fungsi Komunikasi Lingkungan pragmatis adalah Artinya adanya teori komunikasi lingkungan dapat mendidik, membujuk, memobilisasi, dan membantu kita untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Fungsi Komunikasi lingkungan konstitutif adalah Adanya komunikasi lingkungan juga membantu untuk membentuk, atau menulis permasalahan tentang lingkungan. Menurut Ruslan, berdasarkan orientasi kampanye terdapat tiga jenis kampanye, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. *Product Oriented Campaign*. Kegiatan kampanye ini berorientasi pada produk dan bertujuan komersial. Aktivitas kampanye yang dilakukan biasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai salah satu cara membangun image yang baik bagi suatu perusahaan.
2. *Candidate-Oriented Campaign*. Atau biasa disebut dengan kampanye politik. Lebih mengacu pada kampanye yang berorientasi utama seorang kandidat demi kepentingan politik. Dengan dilatarbelakangi sebuah tujuan yaitu memperoleh dukungan dalam melaksanakan suatu kegiatan politik.
3. *Ideological or Cause Oriented Campaign*. Kampanye yang mempunyai orientasi tujuan yang bersifat khusus. Kampanye ini memiliki tujuan yang jelas dan spesifik akan adanya perubahan berdimensi sosial. Yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan lapisan masyarakat. Kegiatan kampanye biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial non-profitable.

Pemanasan global seringkali jadi alasan, kenapa kebakaran hutan dan lahan gambud yang masih sering terjadi. Uni Eropa menekankan adanya langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Sebagai organisasi yang memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan politik mengenai perubahan lingkungan secara global. Uni Eropa mengembangkan berbagai regulasi dan program aksi kampanye dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang termasuk berbagai isu terkait. Keprihatinan Uni Eropa terhadap lingkungan seperti perubahan iklim secara global, penipisan lapisan ozon dan kebakaran hutan. Dalam wujud keperhatian terhadap isu lingkungan Uni Eropa menyelenggarakan Pekan Diplomasi Iklim 2018 (Climate Diplomacy Week 2018). Uni Eropa bekerja sama dengan Kedutaan Besar Polandia, Kedutaan Besar Italia, Pusat Kebudayaan Italia dan platform sosial LiveLife Indonesia. Salah satu mengkampanyekan dan mensosialisasikan isu lingkungan, Uni Eropa dalam hal ini menyelenggarakan nonton bareng dan diskusi Film "Semesta" Film Dokumenter "Sayang Kalimantan" dan "Haze: It's Complicated". Pemutaran ketiga film tersebut diikuti diskusi publik bertema "Memahami Kebakaran

²⁴ Galuh, Angelica Fortuna, "Mengenal Komunikasi Lingkungan," *Kompasiana*, November 17, 2017, <https://www.kompasiana.com/angelicagaluh/5a0e97f363b2482dob30a2e2/mengenal-komunikasi-lingkungan>.

²⁵ Ruslan, Rosady, *Kampanye Public Relations*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

Hutan & Dampaknya". Selama sepekan mulai tanggal 23 hingga 30 September 2018, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mensosialisasikan sejumlah aspek pelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta.²⁶

Sebagai organisasi yang giat dalam kampanye isu-isu lingkungan Uni Eropa sepanjang tahun melakukan giat kampanye lingkungan di Indonesia yang lebih di kenal dengan Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week) dan ini adalah kegiatan-kegiatan kampanye lingkungan Uni Eropa sepanjang tahun 2016-2018. Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week), Selasa 13 September 2016 yang diselenggarakan oleh Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda dan Swedia. Pekan Diplomasi Iklim ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan KTT Perubahan Iklim di Paris (COP 21) dan menyambut KTT Perubahan Iklim di Marrakesh (COP 22) dan merupakan upaya untuk mempromosikan upaya-upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan upaya tersebut kepada masyarakat Indonesia. Menekan bumi dari kenaikan suhu sebesar 20C, merupakan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Paris. Peran Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi, dengan jumlah hutan terbesar ke-2 di dunia, Indonesia menjadi negara paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar ke-2 dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar.

Dengan adanya kampanye tersebut pemerintah lebih fokus dalam menjaga hutan sesuai yang di katakana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia mendorong melakukan skema Perhutanan Sosial untuk tetap menjaga tertutupnya lahan-lahan hutan. Salah satu kebijakan menjaga kenaikan suhu bumi yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjadi negara pertama yang membuat sistem legalitas kayu FLEGT untuk memerangi *illegal logging*.²⁷ Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa di Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 26 sampai dengan 30 November 2017, Uni Eropa bersama dengan Negara-negara Anggota termasuk Perancis, Jerman, Italia, Swedia, dan Inggris, yang mempromosikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tujuan dari Pekan Diplomasi Iklim adalah mengkomunikasikan dan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia aksi terkait perubahan iklim yang menekankan keterkaitannya dengan "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" seperti, antara lain, green finance, energi yang dapat diperbaharui, penggunaan lahan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan transportasi yang ramah lingkungan. Uni Eropa juga menggandeng sejumlah inisiatif yang mendukung kebijakan dan praktik perubahan iklim yang dilakukan oleh institusi pemerintahan Indonesia dan aktor non-negara termasuk masyarakat sipil. Yang terutama di antaranya adalah perjuangan melawan deforestasi seperti misalnya EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Partnership

²⁶ Barus, Herry, "UE Tingkatkan Kesadaran Publik Akan Kompleksitas Dan Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia," *Industry.Co.Id*, October 1, 2018, <https://www.industry.co.id/read/43035/ue-tingkatkan-kesadaran-publik-akan-kompleksitas-dan-dampak-kebakaran-hutan-di-indonesia>.

²⁷ KemenLHK, "Indonesia Dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim," *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI*, September 13, 2016, SP. 72/HUMAS/PP/HMS.3/8/2016 edition.

Agreement, yang menggambarkan kolaborasi penting antara produsen dan pembeli yang berkelanjutan.²⁸

Tidak hanya itu Pada 23 September hingga 6 Oktober 2019, Uni Eropa bersama negara-negaraanggotanya menyelenggarakan serupa, merupakan angkaian kegiatan kampanye mencegah perubahan iklim di kawasan Uni Eropa dan di seluruh dunia. Di Indonesia, Delegasi Uni Eropa dan Kedutaan Besar Negara-Negara Anggota Uni Eropa menandai “Climate Diplomacy Week 2019” dengan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan berbagai pihak lainnya, untuk meningkatkan kesadaran publik akan masalah-masalah terkait perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman langsung yang nyata. Tidak satu pun negara yang dapat terhindar darinya, dan dibutuhkan upaya kolektif untuk menyikapinya, ujar Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan

Hidup Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Michael Bucki di Jakarta. Menurutnya, dunia telah alami begitu banyak dampak buruk dari perubahan iklim, di mana aksi global untuk menguranginya tidaklah cukup. Uni Eropa adalah bukti bahwa banyak upaya positif yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.²⁹

C. Peran Uni Eropa Sebagai Motivator

Kampanye lingkungan yang dilakukan uni eropa menunjukkan bahwa manfaat dari program kampanye lingkungan diharapkan dapat memotivasi bagi masyarakat Indonesia dan juga lingkungan di kalimantan. Hal penting disampaikan Libertine (2014) bahwa manfaat pelaksanaan program kampanye tentu akan diperoleh ketika penyelenggara program kampanye secara konsisten dalam memberikan penerangan terus menerus serta pengertian dan memotivasi masyarakat terhadap isu kampanye yang sedang diselenggarakan melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana.³⁰ Kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Motivasi tersebut pada akhirnya akan menentukan ke arah mana kampanye akan digerakkan dan tujuan yang akan dicapai. Jadi secara inheren ada keterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye.³¹

Sebagai organisasi internasional yang terlibat aktif dalam mengampanyekan isu lingkungan hidup dalam mencegah perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan kebakaran hutan di kawasan Eropa dan seluruh Dunia. Diharapkan pesan kampanye yang disampaikan melalui film-film yang ditayangkan diharapkan dapat membangun pengetahuan publik tentang peningkatan resiko kebakaran hutan, menurunnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta kualitas iklim dan dapat termotivasi untuk selalu menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari ulang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Media merupakan pragmatis dan konstruktif untuk

²⁸ Maroe, Yulia, “Uni Eropa Luncurkan Pekan Diplomasi Iklim 2019,” *Hijauku.Com*, September 23, 2019, <https://hijauku.com/2019/09/23/uni-eropa-luncurkan-pekan-diplomasi-iklim-2019/>.

²⁹ Sugesti, Afra, “Climate Diplomacy Week, Cara Kreatif Uni Eropa Kampanye Cegah Perubahan Iklim,” *Liputan6*, September 25, 2019.

³⁰ Chandra, Alodia Libertine, “STRATEGI KAMPANYE ‘BREAST CANCER AWARENESS MONTH,’” *Jurnal E-Komunikasi* 2, no. 1 (2014).

³¹ Venus, Antar, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial* (Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2004).

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan. Menyangkut strategi pengemasan pesan dalam media untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan adalah pemerintah dan organisasi non pemerintah yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.³² Dengan kata lain, program kampanye tersebut merupakan sebuah keharusan bagi Uni Eropa sebagai organisasi internasional untuk berperan sebagai komunikator utama dalam komunikasi lingkungan. Program kampanye lingkungan yang dilakukan Uni Eropa yaitu terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku dari masyarakat. Melalui program ini maka akan termotivasi membangaun mental masyarakat yang berkomitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan terutama dalam menjaga hutan dan flora fauna yang ada di dalamnya. Melalui program kampanye ini, masyarakat akan teredukasi untuk memahami pentingnya menjalankan program gerakan lingkungan dalam kelestarian lingkungan dan hutan, hal ini akan menyentuh aspek sikap menjadi suka dan ingin terlibat dalam program kampanye ini. Implikasi positif dari adanya pengetahuan dan sikap tersebut, yang dapat mendorong masyarakat untuk bergerak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Hutan merupakan paru-paru duni yang perlu kita jaga karena jika tidak, akan membawa dampak buruk bagi kita di masa kini ataupun dimasa mendatang. Dalam menjaga lingkungan khususnya kelestarian hutan yang dapat dimanfaatkan, mafaat hutan untuk ekonomi adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau dapat diolah menjadi kerajinan tangan, membuka lapangan pekerjaan pembalok hutan secara legal, dan juga penyumbang pendapatan negara dari hasil penjualan kayu keluar negeri. Fungsi klimatologis hutan adalah hutan dapat mengatur iklim, hutan adalah paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan udara bersih bagi manusia. Dari fungsi secara hidrolis hutan dapat menampung hujan di dalam tanah mencegah intrusi air laut yang asin dan mengatur tata air tanah.

Manfaat hutan dari segi ekologis hutan mencegah erosi dari banjir menjaga kesuburan tanah dan sebagai wilayah yang menjaga keragaman hayati.³³ Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari program kampanye ini merupakan sebuah gambaran dari pentingnya komunikasi lingkungan yang ditujukan kepada masyarakat melalui program kampanye lingkungan. Hal ini sebagaimana pendapat Oepen and Hamacher bahwa komunikasi lingkungan merupakan proses komunikasi secara terencana dan strategis yang digunakan produk media untuk mendukung pembuatan kebijakan yang efektif, partisipasi masyarakat dan pelaksanaan proyek yang diarahkan pada kelestarian lingkungan.³⁴

³² Ch. Herutomo and S. Bekti Istiyanto, "KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM MENGEMBANGKAN KELESTARIAN HUTAN," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20, no. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>.

³³ Nagel, Julis F., "Pelestarian Hutan Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Dan Potensi Ekonomi," *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur Dan Sipil)*, 2020, http://repository.gunadarma.ac.id/1466/1/Pelestarian%20Hutan%20dalam%20Hubungannya%20Dengan%20Lingkungan%20dan%20Potensi%20Ekonomi_UG.pdf.

³⁴ Lestari, Puji et al., "Komunikasi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 1 (n.d.).

KESIMPULAN

Peran Uni Eropa dalam kampanye lingkungan melalui film "Save Kalimantan" adalah sebagai berikut.

1. Peran Uni Eropa sebagai advokasi, dengan bekerjasama antara Greenpeace Indonesia dengan Greenpeace Uni Eropa agar mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan nyata guna menanggulangi praktik deforestasi global. Desakan ini mendapatkan respon dari Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ RED II) yang dituangkan dalam regulasi turunan (Delegated Act). Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep Indirect Land Use Change (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel.
2. Peran sebagai komunikator
Uni Eropa menekankan adanya langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh pemansan global. Uni Eropa mengembangkan berbagai regulasi dan program aksi kampanye dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang termasuk berbagai isu terkait. Keprihatinan Uni Eropa terhadap lingkungan seperti perubahan iklim secara global, penipisan lapisan ozon dan kebakaran hutan. Dalam wujud keperhatinan terhadap isu lingkungan Uni Eropa menyelenggarakan Pekan Diplomasi Iklim 2018 (Climate Diplomacy Week 2018) yang di selenggarakan di Jakarta.
3. Peran sebagai motivator dalam kampanye lingkungan
Melalui program ini maka masyarakat akan termotivasi membangaun mental masyarakat yang berkomitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan terutama dalam menjaga hutan dan flora fauna yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. *International Organizations: Fourth Edition*. New York: Routledge, 2015.
- Ardian, Heldi Yunan. "KAJIAN TEORI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENELITIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM." *Perspektif Komunikasi* 1, no. 1 (2017).
- Barus, Herry. "UE Tingkatkan Kesadaran Publik Akan Kompleksitas Dan Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia." *Industry.Co.Id*, October 1, 2018.
<https://www.industry.co.id/read/43035/ue-tingkatkan-kesadaran-publik-akan-kompleksitas-dan-dampak-kebakaran-hutan-di-indonesia>.
- BBC News Indonesia. "Indonesia Gugat Uni Eropa Ke WTO Atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit.'" *BBC News Indonesia*, December 16, 2019. Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan 'diskriminasi sawit'.
- Chandra, Alodia Libertine. "STRATEGI KAMPANYE 'BREAST CANCER AWARENESS MONTH.'" *Jurnal E-Komunikasi* 2, no. 1 (2014).
- Dormoy, Daniel. *Droit Des Organisations Internationales*. Paris: Dalloz, 1995.

- European Union External Action: The Diplomatic Service of the European Union*. "Uni Eropa Tingkatkan Kesadaran Publik Akan Kompleksitas Dan Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia." September 23, 2018. <https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/51226/uni-eropa-tingkatkankesadaran-publik-akan-kompleksitas-dandampak-kebakaran-hutan-di-id>.
- Friana, Hendra. "Jokowi Diminta Tegur Luhut Soal Ancaman Keluar Paris Agreement." *Tirto.ID*, March 29, 2019. <https://tirto.id/jokowi-diminta-tegur-luhut-soal-ancaman-keluar-paris-agreement-dku9>.
- Galuh, Angelica Fortuna. "Mengenal Komunikasi Lingkungan." *Kompasiana*, November 17, 2017. <https://www.kompasiana.com/angelicagaluh/5a0e97f363b2482d0b30a2e2/mengenal-komunikasi-lingkungan>.
- Gumilar, Pandu. "Petani Kelapa Sawit: ISPO Perlu Setara Dengan RSPO." *Bisnis*, March 28, 2018. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180328/99/755287/petani-kelapa-sawit-ispo-perlu-setara-dengan-rspo>.
- Herutomo, Ch., and S. Bakti Istiyanto. "KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM MENGEMBANGKAN KELESTARIAN HUTAN." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>.
- KemenLHK. "Indonesia Dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim." *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI*, September 13, 2016, SP. 72/HUMAS/PP/HMS.3/8/2016 edition. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI*. "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020." Accessed July 20, 2020. <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/lu>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Inilah Deforestasi Di Indonesia Periode 1990-2017." *Databoks KataData*, August 20, 2019.
- Lestari, Puji, Kusumayudha, Sari Bahagiarti, Paripurno, Eko Teguh, and Ramadhaniyanto, Berliyan. "Komunikasi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 1 (n.d.).
- Maroe, Yulia. "Uni Eropa Luncurkan Pekan Diplomasi Iklim 2019." *Hijauku.Com*, September 23, 2019. <https://hijauku.com/2019/09/23/uni-eropa-luncurkan-pekan-diplomasi-iklim-2019/>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. 2nd ed. 6. Bandung: Alumni, 2015.
- Nagel, Julis F. "Pelestarian Hutan Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan Dan Potensi Ekonomi." *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur Dan Sipil)*, 2020. http://repository.gunadarma.ac.id/1466/1/Pelestarian%20Hutan%20dalam%20Hubungannya%20Dengan%20Lingkungan%20dan%20Potensi%20Ekonomi_UG.pdf.
- Rahmansyah, Abdul Rauf. "TRANSFORMASI AKTOR POLITIK INTERNASIONAL: Studi Kasus Peranan Greenpeace Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia." *HIMAHIFISIP UNHAS*, December 20, 2015. <https://himahiunhas.id/index.php/2015/12/20/transformasi-aktor-politik-internasional-studi-kasus-peranan-greenpeace-terhadap-kerusakan-lingkungan-di-indonesia/>.
- Riset Kelapa Sawit. "Resolusi Minyak Sawit Uni Eropa & Isu Deforestasi." *GAPKI*, April 26, 2017. <https://gapki.id/news/2017/04/26/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi/>.

- Robert Jackson and Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, n.d.
- Ruslan, Rosady. *Kampanye Public Relations*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- "Statistical Yearbook of Indonesia 2018." Badan Pusat Statistik, 2018.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2018/07/0%203/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>.
- Stephanus, Daniels. "Sekelumit Cerita Tentang Advokasi Lingkungan Hidup." *Kompasiana*, December 11, 2015.
https://www.kompasiana.com/danielstephanus/566a36da7097732a06d644dd/sekelumit-cerita-tentang-advokasi-lingkungan-hidup?page=all&page_images=1.
- Sugesti, Afra. "Climate Diplomacy Week, Cara Kreatif Uni Eropa Kampanye Cegah Perubahan Iklim." *Liputan6*, September 25, 2019.
- Suhendra, Zulfi. "Jutaan Pekerja Industri Sawit Terancam Kebijakan Uni Eropa." *DetikFinance*, April 24, 2019.
- Suryani, Ita. "PERAN MEDIA FILM SEBAGAI MEDIA KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP Studi Kasus Pada Film Animasi 3D India 'Delhi Safari.'" *Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde* 2, no. 2 (2014): 79–90.
- Susanto, Dinar Agus. "DAYA SAING EKSPOR PRODUK CPO INDONESIA DAN POTENSI HILIRISASI DIOLAH MENJADI BIODIESEL." *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 4, no. 2 (December 7, 2020). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.952>.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2004.
- Virgy, Muhammad Arief, Yusa Djuyandi, and Wawan Budi Darmawan. "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International." *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (January 24, 2020): 74–91.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.
- Warta Ekonomi. "Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit." *Warta Ekonomi*, August 4, 2019.
<https://wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi-perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit>.
- "Yearbook of the International Organization Vol. 15." Brill, 1974.
- Yuliawati, Yuliawati. "IDENTIFIKASI KAMPANYE GERAKAN LINGKUNGAN HIJAU DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL (Studi Kasus Tentang Identifikasi Kampanye Progam Lingkungan Hijau Melalui Tanaman Hidroponik Oleh Kodim 0503 Jakarta Barat)." *JPI: Jurnal Politikom Indonesia* 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1423>.